

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Manaf, Nurul Athirah. (2010). *The Impact of Performance Audit: the New Zealand Experience*. <http://hdl.handle.net/10063/1376>. Accessed 23/01/2014
- Achmad Badjuri, Elisa Trihapsari. (2009). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik Pemerintah*. <http://hardiyantowb.wordpress.com>. Accessed 23/01/2014
- Arens, A.A., Elder, R.J., & Beasley, M.S. (2012). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. United States: Pearson Hall.
- Bastian, Indra. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia. (2007). *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Johnsen, Åge. (2001). *Performance auditing in local government: An exploratory study of perceived efficiency of municipal value for money auditing in Finland and Norway*. *The European Accounting Review*, 10 (3): 583–599.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Narimawati, Umi. (2007). *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Agung Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Rai, I Gusti Agung. (2011). *Audit Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Revrison, Baswir. (2001). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE : Yogyakarta.
- Sadeli, Dadang. (2008). *Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah*. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.
- Somantri, Ating dan Muhidin, Sambas Ali. (2006). *Aplikasi Statistik Dalam Penelitian*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumaryati, Anna dan Lako, Andreas. (2003). *Akuntabilitas Publik dan Pentingnya Audit kinerja Sektor Publik dalam Era Otonomi Daerah*. UBAYA. VOL.7, No.4 Mei. Hlm. 27-44.

- Supardi, Deddy dan Wiarty, Sheirly. (2009). *Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas*. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.
- Tuasikal, Askam. (2008). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. 1. Juni. Hlm. 66-88.
- Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Wilopo. (2001). "Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah". Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.
- Wulandari, Indah. (2013). "Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam Menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Padang." Universitas Negeri Padang. Vol 12, No 5. Juni. Hlm 45-73.